

Gaya Komunitas Pemuda: Studi Kasus Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Yogyakarta

Ekamara Ananami Putra^{*)}

ABSTRAK

Artikel ini berupaya mengulas dan memberikan gambaran tentang salah satu komunitas pemuda di Yogyakarta, yaitu Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Yogyakarta. Fokus pembahasan yaitu manajemen organisasi dan strategi gerakan dari KOPHI Yogyakarta. Hal tersebut diangkat karena walaupun KOPHI Yogyakarta merupakan “anak baru” dalam pergaulan komunitas di Yogyakarta, khususnya komunitas pemuda yang bergerak di bidang lingkungan hidup, tetapi telah mendapatkan nama dan tempat tersendiri di pergaulan komunitas kepemudaan. Akan semakin menarik karena kemampuan KOPHI Yogyakarta dalam melakukan dua hal di atas, tentu tidak lepas dari kapasitas pengurus dan anggotanya yang notabene para pemuda dalam mengelola organisasi.

Kata kunci: *KOPHI Yogyakarta, manajemen organisasi dan strategi gerakan, pemuda*

ABSTRACT

This article attempts to describe and give an overview of one of Yogyakarta's community youth organisations, namely Koalisi Pemuda Hijau Indonesia/Green Indonesia Youth Coalition (KOPHI). The focus of the discussion is on organisational management and strategies of KOPHI Yogyakarta. These issues are focused on because although KOPHI Yogyakarta is “the new kid on the block”, it has already managed to earn its own place and name within youth community associations. This achievement by KOPHI Yogyakarta is particularly interesting because it cannot be separated from the capacity of its board and members who are first and foremost, youth in the management of the organization.

Keywords: KOPHI Yogyakarta, organisation management, movement strategy, youth

PENDAHULUAN

Data terakhir tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan sedikitnya ada delapan organisasi pemuda yang terdaftar resmi di BPO (www.bpo-diy.or.id). Padahal, jika penulis amati di Yogyakarta cukup banyak komunitas-komunitas atau

organisasi yang anggota dan aktivitasnya dilakukan oleh para pemuda.

Organisasi-organisasi yang ada terbentuk karena beberapa faktor, seperti kesamaan identitas, budaya, hobi dan minat. Hillery (1955) menjelaskan bahwa suatu komunitas dapat terbangun berdasarkan fisik atau lokasi geografi dan kesamaan dasar akan

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Yunior. Ekamara Ananami Putra adalah mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM 2011;

kesukaan atau kebutuhan. Gusfield (1977), memandang komunitas terbagi atas dua dimensi yaitu dimensi wilayah dan dimensi kekerabatan.

Dimensi wilayah yaitu komunitas yang terbentuk oleh lingkungan kerja yang mempunyai suatu hubungan antarindividunya tetapi hanya terjadi pada wilayah tersebut. Sedangkan dimensi kekerabatan yaitu ketika komunitas terbentuk tanpa ikatan wilayah tetapi terjalin hubungan antarindividunya. Ikatan-ikatan mahasiswa pelajar daerah di Yogyakarta misalnya termasuk bentuk komunitas yang berdasarkan lokasi geografi dan kewilayahan. Seperti, Keluarga Mahasiswa Riau Gajah Mada (Kemarigama) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Minang (Forkommi).

Sementara di dalam situs <http://www.brainyqoute.com> membagi komunitas berdasarkan lima hal. *Pertama*, kesamaan dalam suatu hobi; partisipasi; dan kesukaan pada barang-barang tertentu. *Kedua*, individu-individu yang memiliki kesamaan pandangan pada nilai-nilai, privasi, kesukaan dan hidup di wilayah yang hukum serta regulasinya sama. *Ketiga*, masyarakat yang besar seperti negara-negara persekutuan; badan politik atau badan publik. *Keempat*, kesamaan karakter. *Kelima*, kesamaan kebiasaan.

Dari beberapa definisi komunitas berdasarkan proses pembentukannya seperti yang dipaparkan di atas, setidaknya dapat ditarik beberapa kesamaan di antara mereka. Salah satunya yakni, komunitas berhubungan erat dengan kehidupan sosial karena menjadi wadah pertemuan dan interaksi tiap-tiap individu sebagai makhluk sosial yang berdasarkan wilayah, kesamaan atas hobi, minat, kesukaan, kebutuhan, agama dan budaya.

Jika melihat beberapa dasar pembentukan komunitas di atas, dugaan penulis bahwa kebanyakan komunitas pemuda di Indonesia termasuk di Yogyakarta ter-

berbentuk karena adanya kesamaan hobi, minat, kesukaan atau kebutuhan dan sedikit karena persamaan pandangan hidup, nilai-nilai atau ideologi. Dugaan ini muncul dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis. Sementara KOPHI Yogyakarta, penulis menilai pembentukannya secara mudah dinilai berdasarkan kesamaan pada nilai-nilai atau ideologi yaitu environmentalisme. Sebuah paham yang membawa nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya memperbaiki kondisi di lingkungan sekitar (Aditjondro, 2003).

Namun demikian, KOPHI Yogyakarta ternyata tidak sekadar komunitas. Tetapi lebih menunjukkan eksistensi dirinya sebagai sebuah organisasi. Karena selain terdapat ikatan kebersamaan antar-anggotanya seperti layaknya komunitas. KOPHI Yogyakarta juga menjalankan prinsip-prinsip atau asas-asas organisasi yang cenderung bersifat formalistik. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya, KOPHI Yogyakarta lebih ditempatkan sebagai sebuah organisasi formal yang tidak sekadar komunitas.

Kepastian bahwa KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah organisasi dan menjalankan asas-asas organisasi. Didasarkan pada pengertian organisasi dan macam-macam asas organisasi. Di dalam buku *Dasar-dasar Organisasi* (Sutarto 1978) misalnya, dijelaskan beberapa pengertian organisasi dan asas-asasnya. Salah satu yang dikutip Sutarto, yaitu Mooney yang menyebutkan bahwa organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara Sheldon, masih dalam buku yang sama menjelaskan bahwa organisasi merupakan proses penggabungan pekerjaan individu-individu atau kelompok-kelompok yang dilakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk penggunaan yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usa-

ha yang tersedia. Sehingga secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai sistem saling pengaruh antar-orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam buku Sutarto (1978), juga terdapat beberapa macam asas organisasi. Allen misalnya merinci enam asas suatu organisasi, yaitu tujuan, pembagian fungsi, tanggung jawab wewenang, pelimpahan, pengawasan dan kontrol. Atas dasar di atas dan pembahasan selanjutnya akan nampak bahwa KOPHI Yogyakarta merupakan sebuah organisasi.

TENTANG KOPHI YOGYAKARTA

Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Cabang Yogyakarta, selanjutnya disebut KOPHI Yogyakarta, merupakan organisasi kepemudaan yang berdiri pada 22 November 2011. Walaupun secara resmi baru di *launching* pada 31 Maret 2012 bertempat di Balaikota Yogyakarta. Pada dasarnya, KOPHI Yogyakarta menurut Satriyo Gumilang yang akrab disapa Gilang, Ketua Umum KOPHI Yogyakarta 2011–2012, lahirnya KOPHI Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres Nasional I KOPHI tanggal 11–13 November tahun 2011 di President University, Bekasi.

Berdasarkan keputusan kongres saat itu, setiap utusan daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan cabang KOPHI di daerah masing-masing. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah peserta kongres bersama 12 daerah lainnya dari seluruh Indonesia seperti Jawa Timur dan Papua. Sehingga beberapa waktu paska kongres, ke-13 daerah peserta kongres telah mendirikan KOPHI di daerahnya masing-masing.

Pada awalnya, anggota merangkap pengurus KOPHI Yogyakarta hanya terdiri beberapa orang saja untuk mengisi divisi-divisi organisasi seperti yang ditetapkan

dalam kongres. Kongres menetapkan untuk kepengurusan di daerah sedikitnya terdapat bagian dan pembagian kerja organisasi meliputi ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, divisi media dan komunikasi serta divisi penelitian dan pengembangan.

Namun selanjutnya supaya organisasi lebih aktif lagi dan diakui eksistensinya oleh masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan dunia komunitas Yogyakarta khususnya. KOPHI Yogyakarta melaksanakan rekrutmen anggota pada medio Desember 2012. Rida Nurafati, Bendahara Umum KOPHI Yogyakarta 2011–2012, menyebutkan awalnya pengurus agak pesimis terhadap minat kawula muda Yogyakarta untuk mau bergabung.

Tetapi ternyata salah, antusias pemuda Yogyakarta sangat tinggi. Terlihat pada jumlah calon anggota yang mendaftar sekitar 80 orang, dan yang mengikuti sampai tahap wawancara sekitar 50 orang. Sebuah angka yang cukup fantastis bagi sebuah organisasi yang baru berdiri apalagi belum berbadan hukum resmi. Dari proses seleksi calon anggota tersebut akhirnya saat ini terdapat 39 orang anggota aktif KOPHI Yogyakarta termasuk pengurus. Yang ke-39 nya berasal dari tingkat dan lembaga pendidikan serta disiplin ilmu yang berbeda-beda.

Dari penilaian penulis yang fokus mengamati perkembangan organisasi ini, bahkan penulis telah menjadi bagian langsung dari organisasi ini sedari awal berdirinya. Terdapat beberapa faktor mengapa KOPHI Yogyakarta mendapatkan perhatian dan antusias tinggi dari kawula muda Yogyakarta. *Pertama, standing position* KOPHI yang meneguhkan dirinya sebagai organisasi yang khusus mewadahi pemuda.

Hal tersebut tertuang di dalam dasar organisasi yaitu AD KOPHI pasal 4, *KOPHI merupakan organisasi pemuda yang berwawasan lingkungan hidup dan....* Dan pasal 4 (1) ART KOPHI yang menyebut-

kan bahwa anggota utama KOPHI merupakan pemuda yang berusia 16–30 tahun. Penggunaan rentang usia tersebut menurut Lidwina Marcella, Ketua Umum KOPHI 2011–2012, merujuk pada UU tentang Pemuda yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemuda itu berusia 16–30 tahun (UU No. 40/2009).

Kedua, mengenai kejelasan nilai atau ideologi yang diusung KOPHI (pasal 4 AD KOPHI), yaitu lingkungan hidup atau *natural environment*. Salah satu isu yang digarap adalah fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang dampaknya telah dapat dirasakan oleh manusia. Kondisi tersebut membangkitkan kawula muda Yogyakarta untuk turut berkontribusi melalui organisasi formal dan terlembaga dalam mengurangi dampak fenomena tersebut.

Di sini, jika KOPHI dilihat sebagai sebuah gerakan sosial maka kehadirannya dapat dijelaskan dengan teori klasik pembentukan gerakan sosial, *strain structure* atau *breakdown theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran sebuah gerakan sosial dari masyarakat, berawal dari adanya keretakan tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, rezim Orde Baru di pengujung 1990-an mengalami keretakan yaitu munculnya berbagai masalah dimulai dengan masalah ekonomi (krisis moneter). Dilanjutkan dengan krisis multidimensi dan ketidakpercayaan publik atas rezim. Sehingga, rezim ini mengalami keretakan yang menghasilkan gerakan kolektif masyarakat yang melahirkan reformasi.

Menggunakan penjelasan Snow, *et al* (2004), dalam memahami teori ini maka KOPHI sesungguhnya muncul karena adanya keretakan tatanan sosial di dalam masyarakat. Keretakan itu muncul di tengah-tengah tatanan masyarakat yang mapan, seperti penggunaan energi yang konsumtif dan boros, perilaku hidup tidak ramah lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Atau

perilaku-perilaku lain yang berdampak buruk pada lingkungan. Kondisi ini, membuat sekelompok pemuda terpanggil untuk melakukan aksi-aksi kolektif dan bergerak di tengah-tengah masyarakat tersebut. Gerakan itu dimulai dengan membentuk sebuah organisasi perkumpulan pemuda yang bernama KOPHI.

Tetapi kehadiran KOPHI Yogyakarta juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori gerakan sosial baru (*new social movement*). Di dalam teori gerakan sosial baru dijelaskan bahwa kehadiran sebuah gerakan sosial tidak lagi fokus pada isu-isu yang berbasis ekonomi-material dan perjuangan kelas semata (Suharko 2006). Gerakan ini mendasari gerakannya dengan nilai-nilai kontemporer dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga, nilai-nilai yang diperjuangkannya pun lebih terspesialisasi seperti environmentalisme dan feminisme.

Gerakan sosial baru (GSB) lebih menekankan pada perubahan paradigma, pandangan atau gaya hidup dan kebudayaan masyarakat pada umumnya. GSB tidak tertarik lagi dengan isu-isu kenaikan upah buruh atau revolusi kelas. Tetapi seperti yang dijelaskan Singh (dikutip Suharko, 2006) bahwa GSB merupakan bentuk respons dari hadirnya dua institusi yang hadir di setiap relung kehidupan masyarakat yaitu negara dan pasar. Sehingga, GSB membangkitkan isupertahanan diri komunitas dan masyarakat untuk melawan ekspansi (pembangunan) negara dan pasar yang semakin meningkat. Ekspresi dari perlawanan tersebut yaitu dengan hadirnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial, seperti kaum urban marjinal, aktivis lingkungan, kelompok anti-otoritarian, kaum anti-rasisme dan kaum feminis.

Ketiga, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan gudang cendekiawan turut mendukung antusiasme dari kawula muda untuk bergabung di KOPHI. Se-

hingga boleh jadi dengan melihat latar belakang pendidikan formal anggota KOPHI Yogyakarta, ketertarikan mereka untuk bergabung di KOPHI Yogyakarta telah berdasarkan pada pertimbangan matang. Pertimbangan yang didasarkan pada kesamaan pandangan ideologi environmentalisme. Kesimpulan ini penulis ambil dari pengalaman penulis mewawancarai calon-calon anggota KOPHI Yogyakarta, baik pada periode pertama maupun kedua. Menunjukkan, dua dari tiga pendaftar menyatakan keinginannya untuk bergabung disebabkan oleh keresahan mereka dengan buruknya kondisi lingkungan sekarang, sehingga perlu melakukan sesuatu secara kolektif untuk perbaikan lingkungan. Itu ditunjukkan pula dengan perilaku mereka yang ramah lingkungan. Setidaknya tiga faktor tersebutlah yang oleh penulis anggap sebagai penyebab utama para pemuda Yogyakarta mau bergabung sebagai anggota.

KOPHI YOGYAKARTA DI TENGAH PERGAULAN ANTAR-KOMUNITAS

Semenjak hadir sebagai sebuah komunitas dan organisasi pemuda berawawasan lingkungan di Yogyakarta. KOPHI Yogyakarta tampaknya cukup diterima dengan baik oleh komunitas atau organisasi lain di Yogyakarta dalam pergaulan antar-komunitas. Ini penulis rasakan ketika KOPHI Yogyakarta bergabung dengan Forum Jogja Peduli (FJP). Sebuah kumpulan besar atau forum komunikasi antarkomunitas di Yogyakarta.

Dalam pengamatan langsung penulis dan berdasarkan catatan KOPHI Yogyakarta di laman resminya (www.tumblr.kophiyogya.com). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan KOPHI Yogyakarta mendapat sambutan positif dari organisasi atau lembaga lain. Seperti ketika medio Februari 2012 melalui sub-divisi internal, KOPHI Yogyakarta melaksanakan kegiatan *KOPHI goes to School*.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMAN 8 Yogyakarta. Dipilihnya SMAN 8 Yogyakarta karena sekolah ini oleh pengurus KOPHI Yogyakarta sebagai salah satu sekolah terbaik di kota ini. Kebetulan, juga salah satu anggota KOPHI Yogyakarta adalah siswa SMAN 8, sehingga relatif lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan administrasi dengan pihak sekolah. Selain untuk mengajak siswa di sekolah tersebut untuk lebih dapat menghargai alam. Sekaligus bertujuan untuk mengenalkan secara langsung KOPHI Yogyakarta ke kalangan pemuda Yogyakarta, sebelum diluncurkan secara resmi.

Di samping kegiatan *KOPHI goes to School*, kegiatan *Grand Launching* KOPHI Yogyakarta pada 31 Maret 2012, juga mendapat apresiasi positif dari komunitas dan organisasi-organisasi lain di Yogyakarta. Beberapa komunitas yang hadir yaitu Walhi Yogyakarta, Apel Koperasi “Kopma” UGM dan Komunitas Jendela. Apalagi peluncuran KOPHI Yogyakarta saat itu dilakukan secara resmi oleh Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, diwakili Asisten Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tentu saja, kehadiran perwakilan pemerintah tersebut memiliki makna berarti. Sebab, itu memberikan pesan bahwa kehadiran KOPHI Yogyakarta diterima sebagai bagian dari anggota masyarakat Yogyakarta oleh pemerintah.

Selain itu, KOPHI Yogyakarta dalam satu tahun terakhir seringkali menerima undangan dari organisasi atau lembaga lain baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara/narasumber. Beberapa undangan tersebut datang dari pelbagai komunitas dan organisasi di Yogyakarta seperti Indonesian Future Leaders (IFL) Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Akademi Berbagi Jogja, dan Youth Power KMS UGM, YRBK Kagem dan Coin a Chance, Harian Kedaulatan Rakyat, Radio Geronimo dan Radio Unisi.

IFL Yogyakarta misalnya mengundang KOPHI Yogyakarta sebagai pembicara dalam tiga kali kegiatannya. Di antaranya yaitu Seminar Hari Bumi “*YOU and earTH*” pada 22 April 2012, dan Refleksi Sumpah Pemuda “*Youth Night*” pada 02 November 2012. Sementara Youth Power KMS UGM mengundang KOPHI Yogyakarta sebagai pembicara dalam kegiatan Simposium Nasional-nya pada 21 Oktober 2012. “*Kadangkala, KOPHI Yogyakarta cukup kewalahan untuk menghadiri undangan dari teman-teman komunitas di Yogyakarta*”, kata Rida.

Dua indikator utama di atas, setidaknya menunjukkan bahwa KOPHI Yogyakarta memang telah diterima dengan baik di pergaulan antar-komunitas Yogyakarta. Dari indikator tersebut, penulis kembali menganalisa penyebabnya. Hasil identifikasi penulis menunjukkan bahwa ada tiga faktor penting yang memengaruhi KOPHI Yogyakarta dapat diterima dengan baik di Yogyakarta. *Pertama*, faktor jaringan. Dalam studi masyarakat sipil atau *civil society* ditekankan betapa pentingnya modal sosial dalam *civil society*, yang salah satunya merupakan *network* atau jaringan. Jaringan yang dimaksud yaitu jaringan pergaulan dan interaksi sosial tiap-tiap anggota.

Di tengah era globalisasi, keterbukaan informasi dan penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan blog yang masif sekarang ini. Luasnya jaringan dan pemanfaatan media-media tersebut dengan baik sangat bermanfaat bagi perkembangan KOPHI Yogyakarta. Manfaat tersebut, terutama dalam hal penyebaran informasi dan sosialisasi tentang organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Harapannya, akan semakin banyak orang tahu tentang KOPHI Yogyakarta dan berniat bergabung sebagai anggota atau menjalin kerja sama.

Bagi KOPHI Yogyakarta yang tergolong masih baru sebagai sebuah organisasi dari

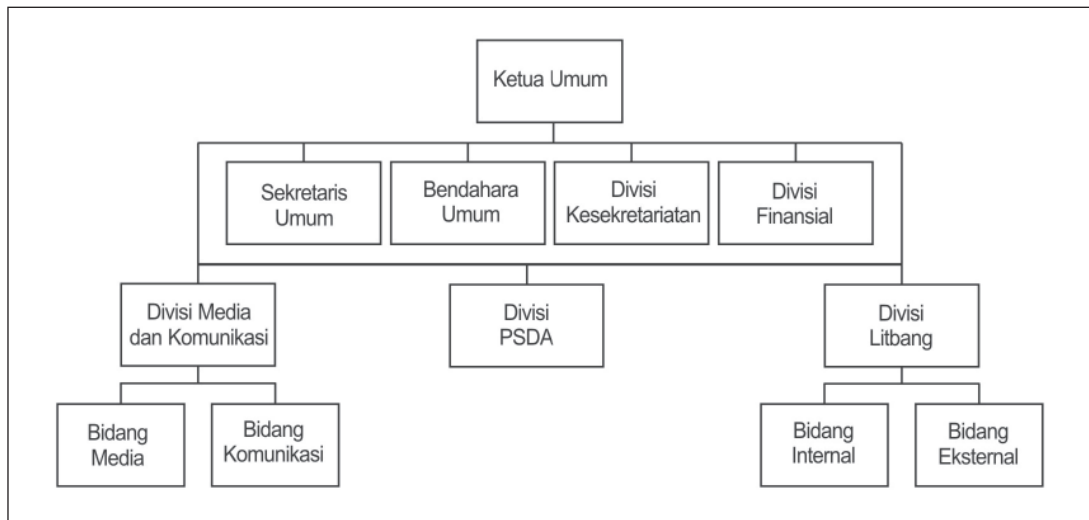
segi usia. Faktor jaringan di atas tidak dapat disepelekan. Di dalam KOPHI Yogyakarta, keberadaannya di dalam jaringan yang luas ternyata berasal dari para anggota. Bahwa anggota KOPHI Yogyakarta bukan saja berasal dari pelbagai tingkat, lembaga pendidikan, disiplin ilmu dan profesi yang berbeda-beda. Tetapi juga banyak di antara mereka yang aktif di dalam dunia organisasi nasional bahkan internasional, sebelum bergabung dengan KOPHI Yogyakarta. Seperti Gumilang, Rida, Andri dan Emmy. Banyaknya aktivis pergerakan ini jelas sangat membantu KOPHI Yogyakarta di dalam pergaulan komunitas tingkat lokal, nasional maupun internasional. Terutama dalam menyosialisasikan tentang apa dan bagaimana itu KOPHI Yogyakarta.

Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sosio-kultur masyarakat Yogyakarta yang terbuka, plural dan inklusif ternyata berpengaruh pada lingkungan pergaulan komunitas di Yogyakarta. Pengaruh itu setidaknya terasa ketika muncul sebuah komunitas atau organisasi baru di Yogyakarta. Seperti KOPHI Yogyakarta disambut dengan tangan terbuka oleh organisasi-organisasi sebelumnya.

Ketiga, faktor orientasi program kerja. Banyak komunitas atau organisasi yang memiliki beragam program kerja, walaupun ada juga yang program kerjanya tidak jelas. Namun selama ini, program kerja yang banyak itu jarang yang mampu menyentuh langsung masyarakat. Karena seringkali suatu organisasi memosisikan dirinya sebagai event organizer, sehingga program kerja yang dijalankan lebih banyak bersifat sesaat dan *happy event*.

KOPHI Yogyakarta tampaknya dalam satu tahun terakhir ini memang tidak memiliki banyak program kerja yang dapat dilaksanakan. Seperti Speak Up dan kerja sama dengan beberapa pihak untuk pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan. Tetapi dari beberapa program kerja

Gambar 1.
Struktur Kepengurusan KOPHI Yogyakarta Tahun 2011–2012



yang telah terlaksana dan akan dilaksanakan, lebih banyak menitikberatkan pada aspek pembangunan masyarakat yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Orientasi pada pembangunan masyarakat ini akan dibahas lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya. Setidaknya ketiga faktor di ataslah yang penulis nilai mengapa KOPHI Yogyakarta yang *notabene* baru dalam pergaulan komunitas dan organisasi masyarakat di Yogyakarta.

MANAJEMEN ORGANISASI

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa KOPHI Yogyakarta merupakan sebuah komunitas pemuda yang menjalankan prinsip-prinsip organisasi. Walaupun bukan sebagai organisasi formal menurut negara—terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM—tetapi KOPHI memang sudah laik disebut sebagai sebuah organisasi dari pelbagai sisi penilaian berdasarkan prinsip-prinsip sebuah organisasi.

Sutarto (1978) menyebutkan banyak sekali tipikal dan prinsip-prinsip organisasi menurut para ahli yang dikutipnya. Dalam kesempatan ini, penulis sejenak hendak menunjukkan walaupun tidak dapat disebut

membuktikan bahwa KOPHI Yogyakarta merupakan sebuah organisasi dengan menggunakan beberapa indikator yang disebutkan Sutarto tersebut.

Pertama, struktur organisasi. Di setiap organisasi baik informal apalagi formal pasti memiliki struktur organisasi yang menjadi representasi kepengurusan sebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat memiliki struktur yang besar dan ruwet, juga ada yang strukturnya kecil dan sederhana. Besar kecilnya struktur ini biasanya cenderung mengikuti besar kecilnya organisasi tersebut, banyak sedikitnya massa organisasi atau ruang lingkup misi organisasi.

Untuk KOPHI Yogyakarta sendiri memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap, tetapi juga tidak begitu gemuk artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. KOPHI Yogyakarta memiliki seorang ketua umum yang berfungsi sebagai pemimpin dan penanggung jawab umum organisasi, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua peran dan perilaku organisasi. Selain memiliki seorang pimpinan (ketua), KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah organisasi juga menerapkan distribusi kekuasaan dari seorang ketua.

Yaitu, adanya pembagian kewenangan berdasarkan bidang-bidang tertentu yang dipimpin oleh ketua bidang.

Sehingga selain memiliki seorang ketua, KOPHI Yogyakarta dalam struktur kepengurusan organisasinya (2011–2012) memiliki beberapa organ lainnya seperti sekretaris umum, bendahara umum, ketua-ketua divisi dan ketua-ketua bidang. Penempatan divisi dan bidang-bidang di KOPHI Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sebagai penunjang dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga diharapkan tidak terjadi penggemukan organisasi yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi aktivitas organisasi.

Selain terdapat struktur dan pembagian kewenangan berdasarkan bidang-bidang tertentu di atas. Sebagai sebuah organisasi pula KOPHI Yogyakarta memiliki jenjang-jenjang pelaporan dan forum koordinasi antarpengurus dan pengambilan keputusan. Forum-forum tersebut mulai dari rapat bidang, rapat divisi, rapat harian pengurus sampai pada rapat pleno (kongres daerah) untuk memilih ketua baru yang diajukan untuk selanjutnya disahkan di dalam kongres nasional.

Sistem administrasi organisasi seperti persuratan, presensi rapat, iuran anggota, pelaporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan juga cukup rapi. Untuk setiap kegiatan ataupun kepanitiaan misalnya, divisi kesekretariatan dan divisi finansial sesegera mungkin setelah kegiatan berakhir akan membuat laporan pertanggungjawaban masing-masing. Yang selanjutnya laporan-laporan tersebut akan direkapitulasi oleh sekretaris umum dan bendahara umum sebagai bahan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada rapat pleno maupun kongres nasional.

Sementara untuk peningkatan kapasitas kompetensi internal anggota dan pengurus, KOPHI Yogyakarta melalui divisi penelitian dan pengembangan (litbang) dan

divisi pemberdayaan sumber daya anggota (PSDA). Telah beberapa kali mengadakan diskusi dan pelatihan yang bersifat internal untuk mencapai tujuan di atas. Peningkatan atau *upgrading* kualitas anggota ini mutlak diperlukan mengingat posisi KOPHI Yogyakarta yang berusaha menempatkan dirinya sebagai komunitas dan organisasi yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Sehingga ketika berada di lapangan (masyarakat) dalam upaya pembangunan tersebut, wawasan dan pengetahuan anggota KOPHI Yogyakarta lebih luas atau setidaknya setara dengan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

Sedangkan untuk menunjukkan eksistensi organisasi selain dari pelaksanaan program kerja. KOPHI Yogyakarta melalui divisi media dan komunikasi cukup aktif bersosialisasi dan berinteraksi melalui media-media sosial, untuk menginformasikan kepada khalayak tentang KOPHI Yogyakarta itu sendiri dan rupa-rupa kegiatan yang diusungnya. Keberadaan divisi ini cukup vital karena di era moderen yang serba digital seperti sekarang, publikasi *online* sebagai bentuk eksistensi melalui media-media sosial seperti Facebook, Twitter dan Blog. Dapat jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan cara-cara konvensional seperti penerbitan buletin atau majalah yang biasanya juga dihambat dengan masalah dana.

Dari pemaparan di atas dapat menunjukkan bahwa komunitas yang bernama KOPHI Yogyakarta bukan sekadar komunitas tetapi sebagai sebuah organisasi. Sebagai sebuah perkumpulan pemuda-pemuda Yogyakarta, organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan ide-ide kreatif yang dimiliki oleh anggotanya. Sehingga dalam pengamatan penulis beberapa kali memerlihatkan seringkali anggota dan pengurus KOPHI Yogyakarta berimprovisasi dalam berorganisasi.

STRATEGI GERAKAN

Sebagai sebuah gerakan sosial (baru) KOPHI Yogyakarta tentu memiliki karakter strategi atau metode gerakan yang kemungkinan mirip dengan strategi-strategi gerakan sosial (baru) lainnya. Meyer dan Whittier (1994) menyebutkan bahwa beberapa metode atau strategi gerakan sosial baru (GSB) dapat dilihat dari pola pengorganisasian, metode operasi gerakan dan target gerakan.

Mari kita perhatikan satu per satu dalam konteks KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah gerakan sosial baru. Untuk pola pengorganisasian, pola gerakan berbasis pada organisasi massa. Artinya KOPHI Yogyakarta dalam pengorganisasiannya mengandalkan anggota dan pengurusnya (massa). Hal itu terlihat dari upaya KOPHI Yogyakarta untuk menarik anggota (bersyarat) yang sebanyak-banyaknya untuk turut aktif dalam aktivitas KOPHI Yogyakarta.

Bahkan relawan-relawan dalam kepanitiaan kegiatan dari program kerja tertentu seperti kepanitiaan *Green Heroes* kemudian diarahkan oleh pengurus untuk turut bergabung menjadi anggota aktif melalui rekrutmen terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah gerakan membutuhkan basis massa yang cukup besar dalam menjalankan roda organisasinya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa KOPHI Yogyakarta bukan tipe gerakan yang berpusat pada seorang pemimpin kharismatik dalam mengorganisasi dirinya.

Selanjutnya terkait dengan metode operasi gerakan, KOPHI Yogyakarta sebagai gerakan populis lebih cenderung memilih metode operasi gerakan yang konvensional. Metode operasi yang konvensional tersebut merupakan metode yang menggunakan jalur-jalur atau saluran legal dalam menyampaikan isu dan melaksanakan program kerja. Dapat dipastikan bahwa semua program-program kerja dan segala aktivitas KOPHI Yogyakarta menggunakan metode

konvensional. Di sini, perlu digaris bawahi bahwa cara konvensional digunakan untuk menjalankan program. Sementara, dalam melakukan sosialisasi kegiatan dan penyebarluasan informasi menggunakan cara-cara kontemporer melalui media sosial seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Diskusi, seminar, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan organisasi lain, mengisi di beberapa forum dan kegiatan lainnya yang bersifat semi pemberdayaan merupakan kegiatan-kegiatan KOPHI Yogyakarta yang selalu menggunakan saluran-saluran legal atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun kegiatan atau program kerja yang menggunakan metode non-konvensional yang memilih saluran-saluran alternatif dengan cara-cara kekerasan, pemaksaan bahkan terorisme.

Sementara untuk target gerakan sendiri, KOPHI Yogyakarta mungkin agak berbeda dengan gerakan-gerakan lain yang telah muncul terlebih dahulu. Sebagai sebuah gerakan yang tidak berbasiskan dan tidak memerjuangkan kelas ekonomi masyarakat tertentu. Tetapi secara umum target KOPHI Yogyakarta merupakan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat muda (pemuda) bukan pada sekadar simbol-simbol kelas atau golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan visi organisasi yang ingin menjadikan KOPHI Yogyakarta sebagai wadah bagi pemuda DI Yogyakarta untuk berkontribusi dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Yang tujuan besarnya yaitu ingin merubah pandangan atau paradigma pemuda dan masyarakat akan pentingnya keselamatan dan kelestarian alam demi terjaminnya kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Sedangkan dalam metode pembiayaan organisasi, KOPHI Yogyakarta mengandalkan sepenuhnya pada pembiayaan yang bersifat kolektif. Secara umum KOPHI

Yogyakarta dalam pembiayaan organisasi menggunakan dua skema yaitu iuran anggota dan subsidi dari KOPHI Pusat yang kedua skema tersebut telah diatur di dalam AD/ART KOPHI. Untuk iuran anggota sendiri, KOPHI Yogyakarta menetapkan keputusan bahwa iuran dilakukan setiap pekannya dengan besaran iuran per anggota Rp 2.000.

Sedangkan subsidi dari pusat akan diperoleh ketika daerah-daerah berencana mengadakan sebuah kegiatan atau program kerja yang membutuhkan dana yang cukup besar meskipun subsidi tersebut sangat kecil. Selain menggunakan dua skema di atas, dalam beberapa kegiatannya seperti kegiatan *Green Heroes* pada November 2012 KOPHI Yogyakarta menggunakan skema kerja sama dengan penyandang dana (*sponsorship*). Begitu pun, sponsor sesuai dengan AD/ART memiliki kriteria-kriteria tertentu seperti bukan merupakan perusahaan rokok atau dianggap sebagai perusahaan yang merusak lingkungan.

Sampai saat ini menurut Rida, yang periode sebelumnya sebagai bendahara umum, KOPHI Yogyakarta tidak mengenal skema donatur perseorangan maupun per lembaga karena masih menjadi perdebatan dan kontroversi di internal pengurus sendiri. Sehingga memang keuangan KOPHI Yogyakarta bergantung pada skema pembiayaan kolektif seperti di atas.

Setelah berbicara panjang terkait pelbagai metode KOPHI Yogyakarta dalam menjalankan aktivitasnya di atas. Selanjutnya penulis akan memaparkan strategi lain yang digunakan KOPHI Yogyakarta dalam menjalankan program-program kerjanya. Strategi tersebut yaitu strategi pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan (*empowerment*) dan pengembangan (*development*).

Terkait itu, dalam pembahasan ini KOPHI Yogyakarta dalam upaya pembangunan masyarakat lebih cenderung me-

milih metode pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sendiri seperti yang disampaikan sebelumnya menjadi karakter atau ciri khas dari program-program kerja yang dirancang oleh KOPHI Yogyakarta. Walaupun dalam setahun terakhir metode tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga hasilnya pun belum dapat dinilai secara utuh.

Namun, Rida meyakinkan bahwa setahun ke depan KOPHI Yogyakarta akan mencoba mengevaluasi dan memperbaiki penggunaan metode tersebut untuk pencapaian hasil yang lebih baik lagi, Bahkan program kerja yang ia susun untuk kepengurusan periode kedua ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi ke depannya.

Selama ini terutama di Indonesia, pembangunan masyarakat seringkali dilihat dengan menggunakan kacamata ekonomimaterialistik semata. Sehingga banyak yang percaya bahwa pembangunan masyarakat dapat tercapai melalui pertumbuhan ekonomi dengan metode pengembangan sumber daya ekonomi dan liberalisasi pasar (Kartasasmita 1997). Yang berakibat pada pengesampingan kemampuan dan potensi internal yang ada pada masyarakat. Kondisi ini muncul ketika masyarakat terus menerus dikembangkan tanpa didampingi dengan pemberdayaan.

Setelah beberapa dekade menganut kepercayaan di atas dan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan selama ini hanya terfokus pada pembangunan fisik semata dengan hasil yang buruk pada sisi pembangunan kapasitas manusia. Akhirnya pemerintah tampak sadar dan terjadi sedikit pergeseran paradigma bahwa membangun masyarakat tidak cukup hanya melalui pengembangan tetapi perlu diberdayakan.

Pergeseran ini sebenarnya bermula pada dekade 2000-an yang lebih banyak dibawa oleh organisasi-organisasi non pe-

merintah (NGOs). Yang setelah hasilnya lebih baik dari beberapa sisi kemudian diadopsi oleh pemerintah dalam beberapa program pembangunannya. Pemberdayaan bagi masyarakat menjadi penting karena salah satu manfaat yang diperoleh yaitu memungkinkan penggunaan bakat atau kemampuan terpendam yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Priyatna, 2012)

Chambers dikutip oleh Kartasasmita (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan model pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Model ini membawa paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”. Paradigma pembangunan partisipatoris mengibaratkan bahwa masyarakat mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya dalam proses pembangunan (Priyatna, 2012).

Dengan konsep pemberdayaan yang berpusat pada kekuatan, kompetensi dan pengalaman masyarakat tersebut. Maka sejatinya menurut Sumodiningrat (dikutip Korompis 2006), pemberdayaan senantiasa melibatkan dua pihak yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan kelompok tertentu yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Setidaknya konsep pembangunan masyarakat dengan model pemberdayaan di ataslah yang saat ini dianut oleh KOPHI Yogyakarta. Organisasi ini dan hampir semua orang di dalamnya percaya bahwa dengan pemberdayaan masyarakat, hasil yang dicapai akan jauh lebih baik karena turut melibatkan langsung masyarakat. Harapannya, masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan oleh KOPHI Yogyakarta selain dapat mengembangkan kompetensi yang ada juga dapat memilih yang baik dan sesuai dengan kebutuhan (*by need*) mereka.

Pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci karena model pembangunan tersebut yang bersifat berkelanjutan (*sus-*

tainable) dan mencakup semua nilai-nilai (*values*) di dalamnya. Kekeliruan KOPHI Yogyakarta yang lalu terhadap aplikasi dan tindakan yang kurang fokus pada model pemberdayaan ini. Harus menjadi pelajaran penting untuk perjalanan berikutnya. Selama setahun penulis rasa sudah cukup bagi KOPHI Yogyakarta untuk melakukan pendekatan dan survei sebagai bentuk peninjauan masyarakat di daerah mana yang akan dijadikan *pilot project* pemberdayaan tersebut.

Tahun kedua sudah waktunya untuk mengerahkan seluruh energi dan sumber daya organisasi yang ada untuk fokus pada program pemberdayaan. Walaupun menurut Rida, pemberdayaan nantinya akan diutamakan terlebih dahulu untuk kelompok masyarakat muda (pemuda) mengingat KOPHI Yogyakarta merupakan organisasi kepemudaan. Sebab, selama ini rencana kegiatan pemberdayaan masih menyasar masyarakat secara umum, belum spesifik kepada kelompok masyarakat muda. Sehingga identitas khas KOPHI Yogyakarta sebagai komunitas pemuda dengan program kerja yang memiliki karakter yang khas pula.

Aspek strategi gerakan melalui program kerja yang berpendekatan pemberdayaan dalam membangun masyarakat inilah. Yang menjadi poin atau nilai lebih dari KOPHI Yogyakarta dalam menjalankan roda organisasinya dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya.

CATATAN UNTUK KOPHI YOGYAKARTA

Sebagai sebuah komunitas dan organisasi yang relatif baru, KOPHI Yogyakarta tentu masih perlu diberi catatan-catatan tertentu untuk peningkatan dan mungkin kinerja KOPHI Yogyakarta yang lebih baik lagi. Meskipun di lingkungan KOPHI nasional sendiri, KOPHI Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai KOPHI Daerah terbaik

pada Kongres Nasional II KOPHI di Jakarta tanggal 29 November–2 Desember 2012.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut bagi KOPHI Yogyakarta seharusnya tidak hanya menjadi pengakuan yang bersifat prestatif belaka. Tetapi sesungguhnya penghargaan tersebut merupakan motivasi dan bahan introspeksi serta refleksi bagi KOPHI Yogyakarta setelah satu tahun berkibar untuk lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga jika diperlukan, terutama bagi pengurus baru catatan-catatan di bawah ini mungkin dapat membantu dalam upaya peningkatan tersebut. Apalagi catatan-catatan ini dibuat berdasarkan penelitian penulis dengan metode observasi partisipatif. Mungkin catatan ini juga dapat berlaku bagi organisasi-organisasi lainnya yang serupa dengan KOPHI Yogyakarta dalam perjalanan organisasinya.

Pertama, rekrutmen keanggotaan. Sekarang ini tercatat masih ada 39 orang anggota aktif KOPHI Yogyakarta dari hasil seleksi bulan November 2011 lalu. Namun dalam perjalanannya, sebagai organisasi baru dan belum besar terdapat beberapa anggota aktif tersebut yang timbul tenggelam karena mungkin masih mencari jati diri dan kesesuaian yang lebih dengan KOPHI Yogyakarta. Sehingga dalam beberapa agenda organisasi ada segelintir anggota yang tidak menyempatkan hadir tanpa alasan bahkan sempat hilang atau lepas kontak dalam beberapa waktu.

Dengan melihat kondisi di atas, maka yang perlu diperbaiki ke depannya yaitu sistem rekrutmen ketika rekrutmen terbuka anggota dilaksanakan. Pada tahun kedua ini, KOPHI Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh ketua barunya Rida Nurafiaty akan kembali melaksanakan rekrutmen terbuka tersebut. Seperti pada rekrutmen-rekrutmen lainnya bahwa tujuan rekrutmen yaitu mendapatkan anggota yang mampu aktif dan berkontribusi penuh dalam setiap aktivitas organisasi, sehingga

dalam rekrutmen nanti perlu kiranya dihadirkan model ‘kontrak politik’ antara calon anggota dengan pengurus KOPHI Yogyakarta. Model ini semacam pakta komitmen. Dengan kontrak yang disepakati bersama ini harapannya akan melahirkan anggota-anggota aktif yang militan dan loyal. Harapan ini tidak muluk karena berdasarkan pada pengalaman satu tahun terakhir, walaupun memang secara legal formal kontrak tersebut tidak berarti apa-apa tetapi secara moral akan berpengaruh kepada tiap anggota.

Dari kontrak tersebut juga dapat dilihat mana calon anggota yang sevisi, semisi bahkan betul-betul sepaham dengan KOPHI Yogyakarta. Jangan sampai merasa orang asing, karena memiliki cara pandang dan tujuan yang berbeda dengan organisasi. Terutama dalam cara mengimplementasikan program kerja, sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi. Jadi, penulis rasa dari rekrutmen inilah titik poin pertama untuk mendapatkan anggota yang dapat berkontribusi lebih bagi dan untuk organisasi yang lebih baik lagi.

Kedua, komitmen pengurus. Seperti yang telah penulis sampaikan sekilas sebelumnya bahwa banyak pengurus KOPHI Yogyakarta merupakan aktivis-aktivis kampus yang aktif di pelbagai organisasi dan pergerakan lainnya dengan kompetensi, kapabilitas, kapasitas dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Yang membuat banyak pengurusnya penuh dengan kesibukan masing-masing ditambah lagi kesibukan kuliah. Akhirnya terdapat beberapa pengurus yang harus seringkali meninggalkan beberapa agenda bahkan tugas-tugasnya di KOPHI Yogyakarta terbengkalai.

Ke depan, terutama untuk kepengurusan baru tahun kedua ini. Ketua baru harus mampu memilih orang-orang yang tidak sekadar berkualitas tetapi juga berkomitmen dan memiliki profesionalitas kerja yang tinggi untuk membantu dalam menjalankan

roda organisasi. Penulis merasa, untuk mengetahui hal tersebut juga tetap bermula dari rekrutmen terbuka di atas. Sebab dari rekrutmen tersebutlah seseorang dapat diketahui juga komitmen dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Calon-calon pengurus harus menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk mengurus KOPHI setahun ke depan. Yang berarti kesediaan dan kesanggupan pula untuk hanya berkonsentrasi mengurus KOPHI Yogyakarta dan tidak merangkap jabatan di organisasi manapun. Sehingga jangan sampai pengurus-pengurus tahun kedua ini bertaburan bintang semata tanpa disertai komitmen dan tanggung jawab.

Ketiga, fokus program kerja melalui pembangunan masyarakat. Ada banyak program kerja yang dirancang dan dijalankan oleh KOPHI Yogyakarta tahun 2011–2012. Namun, penulis menilai program-program kerja tersebut masih belum berada dalam satu garis yang berkesinambungan dan mengacaukan konsep *sustainable program*. Artinya, program-program yang dilakukan itu tidak terlalu berbeda atau saling menegasikan satu sama lain baik dalam periode yang sama atau antarperiode. Program-program yang berkesinambungan dan berkelanjutan saat ini berarti penting bagi sebuah organisasi berbasis lingkungan hidup.

Dalam faktanya KOPHI Yogyakarta setahun terakhir lebih sering menjadi *volunteer* acara organisasi-organisasi lain dan menjadi pengisi di beberapa forum. Ketimbang melakukan kegiatan atau program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Padahal pembangunan masyarakat merupakan karakter atau ciri khas yang coba dibangun oleh KOPHI Yogyakarta sebagai komunitas pemuda yang membedakannya dengan banyak organisasi serupa lainnya yang lebih bersifat persuasif dan advokatif dalam beberapa program kerjanya.

Apalagi sebenarnya KOPHI Yogyakarta telah memulai dengan langkah awal yang

positif yaitu dengan melakukan pelbagai kegiatan pendekatan di beberapa kampung yang terdapat di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pendekatan melalui berbagai macam kegiatan tersebut merupakan bentuk dari upaya penjajakan yang dilakukan untuk mengetahui kampung mana nantinya yang paling laik dan membutuhkan pemberdayaan.

Tampaknya pada tahun kedua ini memang KOPHI Yogyakarta akan lebih memusatkan lagi perhatiannya pada proses pembangunan masyarakat. Sehingga catatan berikutnya yaitu bagaimana pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dengan program-program kerja yang berkesinambungan pula serta memerhatikan aspek kebutuhan dan penerimaan dari masyarakat yang dijadikan sebagai *pilot project* pembangunan tersebut.

Setidaknya tiga catatan di atas yang menjadi fokus perhatian kritik penulis atas KOPHI Yogyakarta selama melakukan penelitian ini. Yang penulis pribadi berharap ke depan pada tahun kedua ini KOPHI Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Sementara untuk beberapa aspek lainnya seperti administrasi, pelaporan keuangan dan kegiatan, serta pengelolaan media-media sosial yang ada. Penulis harus mengakui bahwa KOPHI Yogyakarta sudah seanggih organisasi-organisasi lain terutama organisasi lingkungan seperti Walhi.

PENUTUP

Selanjutnya, KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah komunitas sekaligus organisasi baru di Yogyakarta meneguhkan posisinya sebagai representasi pemuda Yogyakarta yang berideologi lingkungan hidup (*environmentalism*). Sebagai sebuah gerakan sosial baru pula, organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan metode-metode dan strategi organisasi pada umumnya.

Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat juga dianut oleh KOPHI Yogyakarta dalam menjalankan aktivitasnya. Walaupun pada tahun pertama kemarin mengalami kelesuan dalam kegiatan pemberdayaan, tetapi pada tahun kedua ini. Pendekatan pemberdayaan akan tetap konsisten digunakan tentu dengan pelbagai upaya perbaikan di dalamnya. Sehingga KOPHI Yogyakarta sesuai dengan harapan orang-orang di dalamnya akan menjadi organisasi pemuda yang memang berbeda dengan organisasi serupa lainnya seperti Walhi, Green Peace atau WWF.

Terakhir, catatan-catatan kritis penulis di atas yang berdasarkan penelitian berpendekatan observasi partisipatoris. Observasi partisipatoris merupakan pendekatan penelitian yang berbasis pada pengamatan peneliti, sekaligus berpartisipasi langsung dalam kegiatan masyarakat atau kelompok yang diteliti. Penelitian ini, juga tentu bukan sekadar mengkritik perjalanan KOPHI Yogyakarta setahun terakhir. Tetapi catatan tersebut harapannya dapat menjadi cermin pada tahun-tahun selanjutnya dalam menjalankan roda organisasi untuk KOPHI Yogyakarta yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G.J., 2003, *Pola-pola Gerakan Lingkungan: Refleksi untuk Menyematkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (AD/ART KOPHI).
- Database Pemuda di DIY, diakses dari <http://bpo-diy.or.id/html/index.php>, tanggal 02 November 2012.
- Gusfield, J. R., *The Community: A Critical Response*, New York: Harper Colophone.
- Hillery, G. J., 1955, Definitions of Community: Areas of Agreement, *Rural Sociology*, Vol. 20, pp. 111–123.
- Kartasmita, G., 1997, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat, makalah disampaikan pada *Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur*, Surabaya 14 Maret 1997.
- Korompis, Fransiska R., 2006, Pemberdayaan Sektor Informal: Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PAD Kota Manado, Program Pasca Sarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tesis tidak dipublikasikan, diakses dari <http://www.damandiri.or.id>, pada 14 November 2012.
- Laporan Pertanggung Jawaban KOPHI Yogyakarta Periode 2011–2012.
- Meyer, D. S., & Whittier, N., 1994, Social Movement Spillover, *Journal Social Problems*, Vol. 41, No. 2 (May, 1994), pp. 277–298.
- Priyatna, A., Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pengukuran Keberdayaan Komunitas Lokal, diakses dari <http://kemosos.go.id/unduh/A.Priyatna.pdf>, pada tanggal 14 November 2012.
- Road to Kongres Nasional, 2011, *KOPHI Letter's*, Profil Edition September 2011, Jakarta: KOPHI.
- Suharko, 2006, Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2006), hal. 1–34.
- Snow, D. A., et al (Ed, 2004, *The Blackwell Companion to Social Movements*, Oxford: Blackwell Publishing.
- Sutarto, 1978, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- <http://brainyquote.com/words/co/community/146100.html>, diakses pada tanggal 02 November 2012.
- <http://kophiyogya.tumblr.com/page/2>, diakses pada tanggal 02 November 2012.